

BAB II

SKETSA BIOGRAFI MOHAMMAD HATTA

A. Hubungan Keluarga Minang

Mohammad Hatta dilahirkan di Kota Bukittinggi 12 Agustus 1902. Mula-mula ia diberi nama Mohammad Athar yang berarti harum, akan tetapi dikarenakan orang-orang di lingkungannya susah dalam memanggil nama Athar yang kemudian ia dipanggil dengan Atta, yang seiring berjalanya waktu menjadi sebuah nama baru yaitu Hatta. Pada waktu kecil Hatta hidup layaknya seperti anak-anak pada umumnya, tetapi ia tidak mempunyai teman yang seumuran karena di lingkungannya banyak dari tetangga-tetangga yang tidak mempunyai anak seumuran Hatta. Hatta sendiri merupakan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya, sejak kecil Hatta sudah mempunyai pribadi yang hemat dan buku yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sifat-sifat Hatta yang rajin, tertib dan juga hemat adalah watak yang diwarisi Hatta dari ayahnya (Swasono, 1980: 5).

Kota kelahiran Hatta terletak di kaki gunung Merapi dan Singgalang. Ayah Hatta bernama Haji Mohammad Djamil, meninggal dunia dalam usia 30 tahun, ketika Hatta masih berumur delapan bulan. Ia berasal dari Batu Hampar, kira-kira 16 km dari Bukit tinggi arah ke Payakumbuh, tempat orang-orang *Siak* (santri) pada abad ke-19 dan dua-tiga dasawarsa permulaan abad ini berdatangan dari seluruh Tanah Air, ditambah lagi dari

Semenanjung Melayu, untuk mendalami ilmu agama serta memperbanyak amal ibadah.

Surau Batu Hampar terkenal memikat, terutama masa pemimpin datuk (kakek) dari Hatta Syaikh Abdurrahman. Syaikh ini, cukup terkenal juga dengan sebutan untuk membedakannya dengan salah seorang paman Hatta yang mengikuti jejak ayahnya yang mejadi Syaikh pula, yang bergelar *syaikh nan mudo*. Tempat ini juga merupakan pusat pengajian tarikat (naqsyabandi). Sungguhpun menjadi pusat tempat kegiatan tarikat, mulai dari keluarga yang bersangkutan dari belahan dunia. Dari kalangan keluarga Syaikh tersebut memang ada yang meneruskan tradisi pendalaman agama dan berdagang. Tradisi yang lazim dijumpai pada kalangan ulama, bukan saja di Asia Tenggara, melainkan juga di seluruh dunia Islam pada umumnya, yaitu merupakan gabungan kegiatan pengajian agama dengan usaha perdagangan, tampaknya dipegang oleh Surau Batu Hampar dan para pembinanya dahulu. Mohammad Djamil sendiri lebih aktif pada dalam bidang usaha. Istrinya, Siti Saleha, berasal dari keluarga yang bergerak dalam usaha ini (Noer, 1990: 15-16).

Sepeninggal ayah Hatta, pihak keluarganya di Batu Hampar, diajak berkonsultasi, terutama dalam mengambil keputusan mengenai jalan hidup Hatta, seperti umpamanya dalam menyekolahkanannya. Dalam hal ini tolak angsur memang turut menentukan, dan walaupun akhirnya dalam hal pendidikan formal ini keinginan pihak keluarga ibu Hatta yang dilaksanakan, namun tidaklah berarti pengaruh pihak keluarga Batu Hampar

dapat diabaikan. Pengaruh tersebut tercermin dalam sikap hidup Hatta yang taat dalam menerima menjalankan ibadah sepanjang hayatnya. Di samping itu Hatta memperlihatkan kecerendungan sistem patrilineal, apalagi setelah ibunya kemudian kawin dengan Haji Ning, seorang pedagang yang berasal dari Palembang. Demikian rapatnya Hatta dengan ayah tirinya sampai Hatta menyangka bahwa Haji Ning adalah ayah kandungnya. Baru setelah Hatta berumur 10 tahun, dan bersekolah di Padang sedangkan ibunya tetap di Bukittinggi, ia menyadari bahwa Haji Ning adalah ayah tirinya yang akhirnya membuat hubungan antara keduanya menjadi renggang (Noer, 1990: 17-18).

B. Masa Bersekolah di Indonesia

Hubungan kekeluargaan seperti ini menyebabkan Hatta tidak merasa terikat dengan sistem adat Minangkabau yang bersifat matrilineal. Malah boleh dikatakan keluarganya dari kedua belah pihak telah mendorong dirinya untuk meluaskan pandangannya melampaui tempat asalnya. Dimulai di Padang ketika bersekolah di *Europese Lagere School* (ELS – sekolah dasar untuk orang-orang kulit putih) di tahun 1913, dan kemudian di MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* – setingkat sekolah menengah pertama) tahun 1917 masa kecilnya dilaluinya secara yang biasa dilakukan oleh anak-anak di tempatnya bercermin, bersekolah, dan mengaji.

Dari masa ini ia telah menunjukkan disiplin yang tinggi terhadap dirinya, baik dalam pembagian waktu, maupun dalam membelanjakan uang. Pendidikan Hatta dimulainya di Bukittinggi dan Padang (Zulfikri, 2010:

60). Setelah menempuh dua tahun belajar di Sekolah Rakyat Bukittinggi, Hatta pindah sekolah ke sekolah Belanda ELS di kota itu juga, kemudian ke ELS Padang mulai kelas lima sampai kelas tujuh. Kepindahan ke Padang terjadi tahun 1913, yang disebabkan oleh keinginan pihak keluarga ibu agar Hatta memperoleh pelajaran bahasa Perancis di samping bahasa Belanda yang mulai diajarkan di kelas lima. Sekolah di ELS ini diselesaikan Hatta tahun 1917 kemudian meneruskan studinya ke HBS (*Hogere Burger School*- sekolah menengah Belanda 5 tahun) (Noer, 1990: 19-21).

Masa pendidikan Hatta memang yang berpindah-pindah ketika Hatta berumur 14-15 tahun ia beralih ke MULO yang ia tamatkan pada tahun 1919. Sejak ia belajar di MULO kesadaran politik dalam diri Hatta mulai berkembang dari pergaulannya dengan para aktivis Serikat Usaha ditambah lagi ia sudah aktif dalam organisasi JSB (Jong Sumatranen Bond : Perkumpulan Pemuda Sumatera) yang kemudian menjadi anggota pengurus perkumpulan. Untuk meningkatkan diri pada tahun 1919-1921 Hatta berkesempatan bersekolah di Jakarta tepatnya di PHS (*Prins Hendrik Handels*). Proses pembelajaran di PHS menggunakan cara pengembangan bukan hafalan, sehingga Hatta tidak kesulitan dan dapat diselesaikannya dengan baik. (Noer, 1990: 23-25).

Pergaulan Hatta memang berkembang luas di Jakarta. Meskipun sebagai pelajar di sekolah Belanda, ia menempatkan diri untuk aktif bukan saja di kalangan pemuda, tetapi juga dalam mengikuti politik. Ia rajin belajar, termasuk mempelajari paham dan perkembangan di luar

sekolahnya. Tukar pikiran antara sesama aktivis JSB dan antara mereka dengan tokoh-tokoh yang lebih berpengalaman secara penuh berkecimpung di tengah masyarakat dalam berbagai bidang, dan hebatnya ia terus menggali pikiran mereka sendiri sambil belajar dari pengalaman yang tua. Dengan begitu suatu cara pembentukan kader secara tak resmi telah berjalan dan berkembang.

Boleh dikatakan para anggota pengurus JSB tersebut kemudian turut aktif dalam pergerakan nasional. Pengalamannya di JSB memang telah turut membentuk pribadinya malah pengalaman hidup dalam kampung halamannya, kemudian di ibu kota Jakarta telah turut memberikan ilmu. Masyarakat kolonial itu sendiri telah juga serta dalam hal ini, sebagaimana juga pelajaran sekolahnya. Walaupun ucapan Hatta ini dikemukakan dalam tahun 1928 yang kemudian memberikan petunjuk tentang dirinya sebelum pergi ke negeri Belanda (Noer, 1990: 30-33).

C. Masa Studi di Negeri Belanda (1921-1932)

Hatta tiba di negeri Belanda tanggal 5 September 1921. Di Indonesia ia merasakan diskriminasi terhadap bangsanya, sebaliknya di negeri Belanda Hatta bukan saja melihat hak rakyat itu diakui dan ditegakkan, melainkan juga orang-orang Indonesia diperlakukan sama dengan orang lain, tanpa diskriminasi. Di negeri Belanda Hatta segera menerjunkan dirinya dalam *Indische Vereniging* (Perhimpunan Hindia) yang dalam tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Organisasi yang mulanya bersifat sosial yang didirikan pada tahun 1908 sebagai forum tempat bertemu orang-orang termasuk di dalamnya pelajar Indonesia, yang merantau ke negeri Belanda. Dengan perkembangan *Indische Vereniging* serta pengalaman Hatta ketika menjabat sebagai bendahara JSB di Jakarta membantu memudahkan dirinya memasuki lingkungan pengurus dalam jabatan ini. Di samping itu ia juga ditunjuk untuk memegang administrasi Hindia Putra, ia juga berkesempatan untuk menjadi kekuatan pendorong dalam organisasi tersebut (Noer, 1990: 39-42).

Dari jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda cukup banyak dan sebagian kecil saja yang tergabung dalam PI. Tetapi bagi PI jumlah itu tidak penting, semangat perjuangan serta kualitas para anggota jauh mengatasi jumlah itu. Bagi Hatta sendiri jumlah tersebut tidak berpengaruh, garis perjuangannya memang sudah tegas. Ia bertemu dan bergaul dengan banyak kalangan, rekan se-Tanah Air serta orang-orang Belanda yang bersimpati, kemudian juga dengan pejuang-pejuang kemerdekaan negeri-negeri lain yang sama studi di Eropa.

Semangat PI tercermin ketika PI diketuai oleh Nazir Datuk Pamontjak pada tahun 1924 dan sekaligus dipertegas oleh Sukiman Wirjosandjojo sebagai ketua PI di tahun 1925. Dasar-dasar yang dibangun dalam kurun waktu tersebut sangat masif yang meliputi persatuan, kemerdekaan yang menghendaki suatu aksi massa nasional yang insaf dan berdasar pada tenaga sendiri yang diarahkan untuk kemerdekaan politik dan

menentang kapital asing yang menyedot kekayaan Indonesia (Noer, 1990: 43-34).

Keterlibatan Hatta dalam PI memunculkan pemikiran-pemikirannya yang banyak dituangkan dalam bentuk tulisan dan pidato, terutama sejak ia menjabat sebagai ketua PI. Ia menulis dalam *Indonesia Merdeka*, majalah PI. Tulisan-tulisan Hatta tidak hanya berkaitan dengan perkembangan tanah air, melainkan juga memberikan pendapat dan saran dalam perkembangan tersebut. Dengan kesempatannya sebagai ketua PI di negeri Belanda Hatta juga berpidato dengan maksud memperkenalkan Indonesia (bukan Hindia Belanda) mengenai cita-cita kebangsaan, penderitaan rakyat banyak, kekejaman perlakuan pemerintah Belanda di Indonesia terhadap rakyat dan pergerakan kebangsaan, dan cara-cara yang menurutnya dianggap perlu dilakukan untuk mencapai kemerdekaan.

Pergerakan PI lalu dengan sendirinya pemikiran-pemikiran ini berdampak di Tanah Air melalui surat-surat yang dibawa oleh mereka yang seusai studi di Belanda maupun yang dikirim melalui pos. Bisa dikatakan bahwa pemikiran dan perjuangan PI dipergunakan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berdiri pada tahun 1927. Selanjutnya PI sendiri menjadi pos depan bagi pergerakan kebangsaan Indonesia di negeri atas angin itu (Noer, 1990: 53-64).

Pada akhir bulan Juni 1932, Hatta melanjutkan masa studinya untuk menyelesaikan ujian doktoralnya. Setelah mengikuti ujian pertama dan

kedua akhirnya dapat ditempuh dengan baik dan mendapatkan predikat yang baik. Kemudian setelah menyelesaikan ujian doktoral, Hatta memutuskan untuk pulang ke Indonesia (Taufik, 2010: 11-15).

D. Berjuang di Tanah Air (1932-1942)

Bulan Oktober 1932 Mohammad Hatta tiba di Minangkabau. Pergerakan demi pergerakan yang telah lalu ia perjuangkan segalanya mempermudahnya untuk segera menempatkan diri sebagai ketua Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Dalam pergerakannya mula-mula Hatta bertemu dengan Sukarno di Bandung pada 25 September.

Momentum pertemuan tersebut sangatlah penting, tidak lain adalah penentuan kemungkinan persatuan kembali PNI-Baru dan Partindo. Sebenarnya usaha penyatuan PNI-Baru dan Partindo sudah diusahakan pula oleh Sukarno dan Maskun, orang PNI-Lama yang masuk PNI-Baru. Hal ini dilakukan beberapa kali di berbagai tempat selama kurang lebih dua bulan yang pada akhirnya partindo dipilih Sukarno karena yang bersedia untuk bisa mengembangkan sayap-sayapnya dengan mengadakan rapat di mana-mana, dan pemimpin berpidato berapi-api seperti zaman PNI-Lama. Hal semacam inilah yang diakui Hatta tak menyukainya (Noer, 1990: 121-125).

Dalam pendirian Hatta hal yang dialaminya tidak menyebabkan Hatta mundur dari kegiatannya dalam PNI-Baru. Tak kemudian semua anggota Pusat PNI Baru termasuk Syahrir ditahan dan dipindahkan di berbagai tempat di Indonesia seperti di Digul, penjara Glodok dan Banda

Neira untuk pertama kalinya tokoh pergerakan nasional Hatta dan Syahrir menginjakkan kaki di Pulau Neira pada tahun 1936 (Hatta, 2015: 229). Meski dalam penjara sekalipun Hatta masih giat melanjutkan tulisan “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”. Ketika Perang Pasifik berkecamuk, pihak Belanda bingung dalam menghadapi perubahan suasana di Pasifik. Akhirnya pada Bulan Januari 1942 dengan tiba-tiba Hatta serta Syahrir dipindahkan ke Suka Bumi oleh pemerintah Belanda.

Dengan permasalahan seperti inilah mulailah Hatta bergerak kembali secara positif menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kemerdekaan Indonesia. Hatta berhasil dalam mengutarakan pemikirannya secara tertulis untuk memberikan bimbingan bagi para pengikutnya dan simpatisannya, memberi pandangan dan analisa tentang perkembangan dan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri dan memberi bahan untuk dipikirkan lebih lanjut guna mengisi kemerdekaan yang menurutnya pasti akan tiba (Noer, 1990: 130-142).

E. Masa Jepang

Perang pasifik membawa perubahan pada jalan hidup Hatta. Oleh karena diajak bekerja sama, maka segera setelah penyerahan pihak Belanda Pada tanggal 8 Maret 1942 dari Jendral Ter Poorten kepada Jendral Hitoshi Imamura. Dengan bekerjasama ini Hatta mulai tinggal di Jakarta lagi. Peranannya sebagai penasihat pemerintah Jepang, ia berkantor sendiri dengan staf yang dipimpinnya sendiri yang umumnya terdiri dari orang

pergerakan. Kantor Penasihat Umum tempat Hatta bertugas ini berfungsi sebagai penghubung antara pihak Jepang dengan para pemimpin Indonesia, sehingga keinginan pemerintah disalurkan, dan sebaliknya kantor tersebut memberi bahan-bahan yang diperlukan oleh pihak Pemerintah dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, agama dan adat.

Kantor Hatta lama-kelamaan berubah menjadi bukan saja penghubung dari pihak Pemerintah Jepang, melainkan juga tempat menampung keluh kesah rakyat tentang perlakuan pihak Jepang. Dengan bahan-bahan inilah Hatta menyampaikan sarannya kepada pemerintah. Pada tahun 1942 dengan kembalinya Sukarno ke Jawa, penasihat itu menjadi “Empat Serangkai” terdiri dari Hatta, Sukarno, Ki Hadjar Dewantara (Taman Siswa) dan K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah). Bulan Maret 1942 pemerintah Jepang melarang semua pertemuan, rapat, penerbitan dan mendengar siaran radio luar negeri, membuat propaganda mengenai organisasi dan struktur pemerintah. Keputusan bulan Juli 1942 menegaskan kembali larangan ini, malah memerintahkan semua perkumpulan agar bubar (Noer, 1990: 185-189)

Tetapi Jepang juga melihat perlunya saluran disediakan untuk menampung hasrat dan keinginan politik rakyat. Persoalannya ialah bagaimana hasrat tersebut sesuai dengan kepentingan peperangan Jepang. Maka pada tanggal 29 April 1942 dibentuklah Pergerakan “Tiga A” yang bertujuan untuk menghapuskan pengaruh-pengaruh dari Barat yang telah merusak “Jiwa Timur”. Tujuan lain ialah agar bangsa Indonesia

menyongkong usaha Jepang dalam memenangkan perang dan dalam membangun Asia Timur Raya dibawah pimpinan Jepang. Pegerakan ini tidak mendapat sambutan hangat dari kalangan pemimpin utama pergerakan. Hatta sendiri menjauh dari Pergerakan Tiga A tersebut. Ketika Sukarno telah tiba di Jawa pun, ia menasihatkan untuk tidak bergabung dengan pergerakan itu. Maka Hatta pun melanjutkan pekerjaannya secara rutin sebagai penasihat pemerintah militer Jepang, kini bersama-sama rekannya dalam Empat Serangkai. Akhirnya Pergerakan Tiga A lenyap.

Pusat Tenaga Rayat (Putera), badan didirikan atas desakan Sukarno dan kawan-kawan yang menginginkan terciptanya suatu gerakan rakyat untuk mencapai tujuan nasional. Dua hal yang hendak dicapai oleh Putera. Pertama menyebarkan pemahaman ideologi, kedua untuk meningkatkan kemampuan usaha. Hatta mengulangi cita-citanya tentang pendidikan massa rakyat dari zaman jajahan dengan PNI-Baru. Hatta mengemukakan rencana Putera untuk :

“memimpin dan melatih segala usaha gerakan, yaitu pertanian dan perhewanan, perikanan, perniagaan, kerajinan, koperasi, pelayaran latihan bekerja, penabungan, perusahaan, peminjaman dan lain-lainnya.”

Pelatihan Putera dilakukan oleh Gunseikan (Kepala Pemerintah Militer) Mayor Jenderal Okasaki Seizaburo di depan massa rakyat di lapangan Ikada yang kini lapangan Monas. Sebagai direktur jenderal, Hatta lebih banyak menghadapi Putera secara harian, ia mengawasi semua bagian (organisasi, usaha, pendidikan, kebudayaan, wanita, propaganda, penyiaran,

pendidikan olah raga, kesehatan, keselamatan masyarakat) (Noer, 1990: 191-202)

Keberadaan Jepang yang kian mundur dari peperangan di pasifik serta adanya pihak sekutu Amerika yang semakin luas pengawasan terhadap pemerintah Jepang khususnya di Jawa. Pemerintah Jepang mengharapkan rakyat Indonesia untuk membantunya dalam peperangan, tetapi setelah janji Indonesia merdeka diberikan meskipun belum jelas tergambar waktunya. Semangat bangsa dalam berbagai kegiatan termasuk serta dalam kegiatan Jawa Hokkai, persiapan ketatanegaraan oleh pemerintah mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hatta sendiri menjadi bagian dalam badan yang dibuka tanggal 28 Mei 1945. Kemudian oleh pemerintah pendudukan Jepang yaitu pada awal bulan Agustus 1945 pekerjaan BPUPKI di lanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Wakil-wakil yang menjadi panitia, merupakan panitia yang ada dari berbagai daerah Indonesia (Noer, 1990: 219-233).

F. Masa Revolusi

Masa pendudukan Jepang pada tahun 1945 menjadi kesempatan yang berhasil dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pemimpin Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Pandangan pemimpin termasuk Hatta melihat perkembangan yang berjalan lebih cepat, Syahrir yang telah menunggu di rumahnya mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dinyatakan oleh

Sukarno. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan lantaran terikat dengan kedudukan Sukarno yang merupakan ketua PPKI. Perlu dipahami bahwa dengan adanya bekerja sama dengan Jepang, bukan merupakan sebuah kerelaan juga bukan untuk kepentingan pribadi Sukarno-Hatta, tetapi untuk mencapai tujuan atau kepentingan semula yaitu kemerdekaan.

Para pemuda tidak bisa berbuat banyak untuk Proklamasi. Akhirnya Sukarno dan Hatta diculik yang terkenal dengan peristiwa Rengasdengklok yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Namun hal tersebut dapat disiasati, atas usaha Subardjo dengan demikian Sukarno dan Hatta dapat dibawa kembali ke Jakarta pada hari yang sama. Usaha rapat pun di langungkan oleh Subardjo dengan menghubungi para anggota PPKI untuk melakukan sidang bersama Sukarno dan Hatta dirumah Maeda mempersiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan teks, waktu dan tempatnya. Sukarno berbicara singkat sebelumnya dan segera upacara pembacaan Proklamasi Kemerdekaan oleh Sukarno. Bendera Merah Putih dinaikkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Teks Proklamasi dibacakan di Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10.00 pagi, para tokoh-tokoh atau pimpinan saling mengucapkan selamat (Noer, 1990: 242-253).

Pada akhirnya kemerdekaan Indonesia dapat terwujud. Kebesaran kedudukan Hatta sebagai Wakil Presiden yang jelas mempunyai keamatan dengan kedudukan Sukarno sebagai Presiden yang dikenal dengan “dwitunggal” tidak serta merta berjalan dengan mulus. Sampai-sampai Bung Hatta sendiri mengatakan Dwitunggal telah berubah menjadi

Dwitanggal (Hatta, 2015: 115). Indonesia yang baru terlahir dihadapkan dengan pengakuan pihak Belanda secara *de facto* yang berarti wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura yang dikenal dengan perjanjian Linggajati pada tanggal 11 November 1946. Dari perjanjian tersebut memungkinkan Belanda untuk membangun kembali kekuatan di Indonesia di samping itu banyak kalangan Indonesia menentang dengan adanya perjanjian itu, sehingga orang-orang PNI, Masyumi dan golongan pengikut Syahrir menarik diri dari kabinet.

Masa revolusi memang banyak menimbulkan banyak gejolak yang timbulkan perjanjian demi perjanjian untuk mengutuskan wilayah Indonesia sebagai negeri yang berdaulat yang diakui oleh dunia internasional. Sungguhpun dalam perundingan Renville yang berlangsung (8 Desember 1947 - 17 Januari 1948) mengakibatkan semakin sulitnya kedudukan RI. Dengan sendirinya Belanda bebas membentuk negara-negara Federal pada daerah-daerah yang didudukinya ditambah semakin sulit ketika Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Setelah Amir Syarifuddin sebagai delegasi Indonesia waktu itu menyetujui isi perjanjian tersebut. Dalam usaha menghadapi Indonesia yang sudah terbagi-bagi akibat pembentukan berbagai negara-negara di daerah-daerah yang diduduki Belanda. Hatta mengancam “negara-negara boneka” buatan Belanda ia mengatakan bahwa rakyat yang bersangkutan juga menginginkan merdeka (Noer, 1990: 309-319)

Dalam kondisi lain di Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag mulai tanggal 23 Agustus - 2 November 1949 yang mana delegasi dari RI langsung diketuai oleh Hatta. Masalah-masalah yang dibicarakan yaitu mengenai Panitia Politik, Hukum dan Ketatanegaraan, Panitia Bidang Ekonomi dan Keuangan, Panitia Bidang Kemiliteran, Panitia Bidang Sosial, dan Panitia Bidang Kebudayaan. Hatta sendiri sangat optimis dalam menghadapi konferensi ini karena dalam memorandum mengenai hal-hal pokok sudah disepakati sejak tanggal 22 Juni 1949. Dalam KMB permasalahan yang paling pokok memanglah persoalan tentang penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, akan tetapi sesungguhnya hal semacam ini bukan merupakan persoalan lagi. Yang menjadi masalah adalah daerah-daerah mana saja yang akan diserahkan dan kemudian kapan penyerahan tersebut dilakukan.

Persoalan-persoalan di atas tentu saja berkaitan pula dengan bidang politik, ekonomi dan keuangan. Persoalan lain berkaitan dengan Irian Barat, meski Hatta ketika masa pendudukan Jepang kurang bergairah terhadap Irian, di masa KMB ia menolak pendapat Hatta yang ingin memisahkan wilayah ini dari wilayah lain Indonesia karena mengingat pada perjanjian sebelumnya sejak perjanjian Linggajati, Irian tidak pernah dipisahkan dari wilayah lain di Indonesia. Dalam bidang politik, ikatan Uni Indonesia - Belanda dalam RI, Ratu Belanda sebagai kepalanya, dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Belanda mempunyai kedudukan istimewa di Indonesia. Dalam RIS TNI merupakan inti dari angkatan perang, akan tetapi Belanda

masih mempunyai misi militernya di Indonesia sesudah penyerahan kedaulatan. Perlu dipahami pula bahwa dalam perundingan KMB Indonesia juga menerima sebagai warisan hutang atas Hindia Belanda sebagai hutangnya kepada belanda dan juga kepada negara lain.

Hal semacam ini tentunya membuat ketidakpuasan yang timbul dari kalangan masyarakat Indonesia terhadap hasil-hasil persetujuan KMB. Namun dalam hal ini perjanjian dalam KMB bagi Hatta merupakan perjuangan momumental bahkan sepanjang hidupnya. Di masa KMB tetapi bukan merupakan bagian dari KMB pihak RI dan PMF (Pertemuan Musyawarah Federal) berhasil pula menyusun UUD RIS pada tanggal 29 Oktober 1949. Sehingga untuk menampung kedaulatan telah terbentuk. Dalam keterangan lain dalam hasil KMB lebih baik hasilnya dibandingkan dengan hasil persetujuan Linggajati dan Renville. Justru dengan adanya KMB, malah seakan-akan RI sudah diakui secara *de jure* oleh dunia internasional.

Menjelang penyerahan akhir dalam penyerahan kedaulatan. Dengan berakhirnya KMB yang serta penjadwalan beberapa keperluan sebagai kelanjutannya dalam Konferensi antar Indonesia terbentuklah suatu Panitia Persiapan Nasional (PPN), pada tanggal 26 November yang dipimpin langsung oleh Hatta. Dalam agenda kepanitiaan tersebut rapat-rapat bersifat tertutup dan rahasia dengan tugas untuk mengesahkan UUD RIS, pemilihan Presiden RI, menerima pengoperan departemen-departemen dari pemerintah federal yang dulu dibuat oleh Belanda termasuk di dalamnya

menjadi penghubung dengan komisi jasa-jasa baik PBB di masa-masa akhir. Lanjutnya pengesahan UUD RIS dilakukan di Jakarta tanggal 14 Desember oleh RI termasuk wakil-wakil semua negara dan daerah. Di gedung Proklamasi Pengangsaan Timur 56 Jakarta inilah penandatanganan dilakukan dan kemudian tanggal 16 Desember bertempat di Yogyakarta, wakil-wakil negara di daerah yang bersangkutan melakukan sidang untuk mengadakan pemilihan Presiden RIS. Sukarno terpilih kembali dengan suara penuh menjadi Presiden RIS (Noer, 1990: 357-370).

G. Hatta dan Demokrasi Parlementer (1950-1957)

RIS dilihat sebagai fase yang bisa tercapai dengan maksimal saat itu ternyata bukanlah merupakan tujuan proklamasi kemerdekaan. Keberadaan RIS merupakan buah hasil dari kompromi dengan Belanda dalam perundingan-perundingan yang dilakukan selama revolusi, tetapi yang perlu diketahui dengan adanya RIS dilain pihak dipandang sebagai modal dalam mencapai tujuan yang sebenarnya.

Dalam arus politik di masyarakat yang menginginkan negara kesatuan sebagai ganti negara serikat. Hatta merupakan tokoh yang menghendaki atau menyukai negara federasi ketimbang negara kesatuan, meski tidak bersikeras Hatta lebih mengikuti arus dengan suara terbanyak akan tetapi tetap dengan catatan bahwa otonomi daerah harus dikembangkan. Usaha untuk menyatukan menjadi negara kesatuan menghasilkan perundingan antara RI dan RIS pada tanggal 19 Mei 1950. RIS

secara resmi dinyatakan menjadi negara kesatuan kembali dengan nama Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, kemudian Hatta dipilih kembali sebagai Wakil Presiden oleh DPR pada tanggal 1 Oktober 1950 (Noer, 1990: 388-409)

Gejolak politik di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan terutama di dalam pemerintah itu sendiri. Sistem yang baru yang digunakan oleh Indonesia merupakan perubahan yang sangat berani, akan tetapi dalam masa Demokrasi Parlementer telah menimbulkan sisi yang kurang bagus terutama pada pola pergantian kabinet. Jatuhnya kabinet Ali yang tidak hanya dikarenakan kuatnya kekuatan oposisi melainkan juga adanya kemerosotan kebijakan yang dijalankan dalam berbagai hal seperti masalah ekonomi, keamanan, politik, personalia kepegawaian. Di sisi lain mulai merajalelanya korupsi. Dengan jatuhnya kabinet Ali dan oleh kepergian Sukarno ketanah suci, Hatta yang duduk sebagai Wakil Presiden bertugas menunjuk formatur. Dalam menjalankan tugas ini Hatta sendiri tidak serta merta langsung menunjuk kepada beberapa tokoh lain, namun lebih dahulu dengan melakukan dengar pendapat dengan partai-partai yaitu PNI, Masyumi dan juga Perti dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 26-28 Juli 1955.

Dalam formatur yang akan dibentuk bertugas membentuk kabinet dengan mendapat dukungan dari DPR. Sedangkan tugas yang akan diemban oleh kabinet tidaklah main-main yaitu dengan mengembalikan kepercayaan dari tentara dan masyarakat termasuk wibawa pemerintah, serta

menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan rencana yang ditetapkan sehingga parlemen yang baru terbentuk nantinya lebih terjamin. Dari formatur tersebut akhirnya muncul tiga nama yaitu Hatta, Wilopo, dan Assat. Kemudian muncul nama Sukiman yang dianggapnya orang yang sangat berpengalaman, oleh karena Sukiman yang ditunjuk tidak bersedia, akibatnya formatur menanyakan kepada Burhanuddin Harahap yang turut hadir yang kemudian terpilihlah kabinet Burhanuddin Harahap yang tersusun secara resmi tanggal 11 Agustus 1955 (Noer, 1990: 451- 464).

Selama berlangsungnya kepengurusan kabinet Harahap ada tiga hal yang kemudian muncul diantaranya adalah peristiwa pembinaan Angkatan Udara, pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dan pembatalan perjanjian KMB. Yang menjadi menarik ketika nama dwitunggal yakni Sukarno dan Hatta mempunyai pandangan yang berbeda. Masalah hubungan Hatta dengan Nasution sungguhpun di masa revolusi mereka dekat, pada permulaan 1950 mulai memperlihatkan kerengangan, ditambah semakin eratnya Nasution dan Sukarno yang kemudian diangkatnya sebagai KSAD. Harapan Hatta yang mengharap supaya kabinet mengambil tindakan tegas untuk menjaga kewibawaan ketaatan Angkatan Darat kepada pemerintah, namun harapannya dalam peristiwa Cililitan terhalang oleh kebijaksanaan dan keinginan Sukarno. Di dalam sidangpun dalam menyelesaikan peristiwa Cililitan antara Hatta dan Sukarno terlihat mulai mengalami perseteruan.

Masalah lain yang mejanjal sejak dulu pada masa kemerdekaan yaitu KMB yang mana diresahkan mengurangi makna kedaulatan. Kehadiran Sukarno yang tidak mau menandatangani RUU yang berakibat pula renggangnya Dwitunggal. Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut ialah persoalan kedudukan Kepala Negara konstitusional. Dalam konstitusi Kepala Negara dalam tindakan maupun langkahnya mestilah tidak menyimpang dari kebijaksanaan kabinet. Disisi lain Hatta yang tak suka dengan sikap pribadi Sukarno yang mulai kontraversi masalah perkawinan yang memperistri lebih dari 4 orang. Hal-hal semacam ini membuat Hatta merasa kecewa berat turut memikul beban tanggung jawabnya meskipun mengkritik akan tetapi tidak dapat berbuat lebih (Noer, 1990: 64-477)

Pada bulan Februari keluarlah desas-desus alasan resmi yang dilakukan Hatta untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden. Tepat pada tanggal 20 Juli 1956, secara resmi Hatta mengirimkan surat kepada DPR hasil pemilihan umum agar berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Hatta mengemukakan tentang ketidakpuasannya tentang perkembangan keadaan yang pada akhirnya tidak dapat ia berbuat apa-apa karena kedudukan konstitusionalnya. Di dalamnya termasuk masalah kepegawaian, Angkatan Perang, masalah lisensi untuk impor dan lain-lain. Tanggal 5 Februari 1957 sesuai keputusan No 13/1957 terhitung sejak 1 Desember 1956 Presiden Sukarno memperhentikan Hatta sebagai Wakil Presiden. Tentunya hal ini telah menimbulkan kekecewaan dari kalangan masyarakat dan tokoh-tokoh yang merasa tidak rida, namun pada

kenyataannya itulah perkembangan politik yang sudah terjadi (Noer, 1990: 481-485).

H. Masa Demokrasi Terpimpin (1957-1966)

Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah konsepsi baru yang oleh Sukarno merupakan keinginan atau gagasan dalam rangka untuk mencari solusi yang tepat untuk Indonesia. Gagasan tersebut pada tanggal 21 Februari 1957 dikenal dengan “Konsepsi Sukarno” yang menurut Sukarno sendiri adalah jawaban atas kesulitan-kesulitan yang ada. Dalam hal ini tentu tidak lepas dari mundurnya Hatta sebagai Wakil Presiden yang membawa pengaruh tak terduga sebelumnya, meski sudah tidak terlibat dalam pemerintahan Hatta tetap memperhatikan berbagai segi perkembangan yang ada dalam masyarakat baik menyangkut persoalan sikap partai dan golongan juga pemerhati masalah kebijakan pemerintah.

Sukarno memandang bahwa apa yang dicapainya pada tahun-tahun sebelumnya tepatnya mengenai demokrasi yang berjalan sesuai dengan UUD 1950 telah gagal, untuk mengganti kegagalan tersebut ia menyarankan kepada kabinet yang kemudian diberi nama dengan “Kabinet Gotong Royong” yang didukung politik yang besar di dalamnya terdiri partai dan fraksi termasuk PKI yang dikehendakinya karena telah menjadi salah satu partai terbesar (Hatta, 2000: 433). Sebuah konsepsi yang sudah dikemukakan oleh Sukarno tersebut kemudian Hatta memberikan penilaiannya. Hatta melihat bahwa konsepsi itu baik, akan tetapi yang

terpenting adalah bagaimana nantinya Sukarno sendiri bisa tidaknya dalam pelaksanaannya. Dalam persatuan memang sangat diperlukan, hanya saja Hatta memandang kebelakang bahwa ia menilai bagaimana Sukarno dalam tahun 1920 gagal dalam sebuah Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang pada akhirnya juga bubar. (Noer, 1990: 487-495).

Oleh karenanya bagaimana bisa akan tercipta dengan PKI dengan partai-partai berdasar agama. Dalam hal tujuan PKI tentunya berbeda dengan yang lain. Dalam mengikut sertakan PKI di kabinet Sukarno melihat bahwa banyaknya jumlah suara yang dicapai di pemilu 1955 dengan jumlah suara enam juta tepatnya di bawah dua partai besar lainnya Masyumi, PNI. Meskipun begitu Hatta lebih menghendaki bahwa PKI tersebut diluar kabinet artinya ia berfungsi sebagai oposisi. Hatta menambahkan memanglah dalam kabinet presidensil di bawah Sukarno dan bukan gotong-royong yang dimaksud oleh Sukarno, memang diperlukan sebuah kekuatan kabinet yang kuat. Kabinet seharusnya terdiri dari orang-orang yang ahli tau cakap dalam melaksanakan pembangunan yaitu sehingga kesulitan-kesulitan pada kabinet perlementer dapat diatasi dengan diadakannya keputusan parlemen berdasarkan keadaan darurat.

Akhirnya Hatta sangat menyayangkan hal ini karena bagaimanapun Sukarno masih berpegang pada konsepsinya, dengan munculnya nama Suwirjo yang ditunjukannya sebagai formatur kabinet pada bulan Maret 1957. Dari tahun ketahun 1957-1958 adalah tahun yang membuat Hatta

sendiri khawatir tentang perkembangan yang ada. Hatta mengamati tentang Demokrasi Terpimpin yang mengandung sisi positif dan negatif. Memang pada tahun ini Hatta unjuk gigi menanggapi terkait perkembangan, termasuk tentang pemikiran Sukarno, namun di tahun berikutnya Hatta menjadi diam.

Akhirnya Hatta tidak bisa menahan kembali dan tiba pada kesimpulan yang tak bisa ditahan lagi dengan menolak semua bentuk, baik itu gagasan maupun praktik Sukarno dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin yang sudah semakin jauh dari dan bertentangan dengan UUD. Hatta sendiri mengemukakan pendapatnya tentang beberapa peristiwa yang dipersoalkan : 1). terbentuknya kabinet Djuanda pada tahun 1957 yang mana Presiden Sukarno menjadi formatur, 2). Pembubaran konstituante pada bulan Juli 1959 bersamaan dengan dilakukannya dekrit UUD 1945, 3). Dengan dibubarkannya DPR yang kemudian dibentuk kembali dengan jumlah kursi yang fenomenal dengan jumlah 261 kursi, terdiri dari orang-orang partai sejumlah 131 dan sisanya dari golongan fungsional. Pembubaran atas DPR hasil pemilu Hatta menyimpulkan bahwa ini yang bisa dikatakan dengan krisis demokrasi dan sama halnya Demokrasi Terpimpin Sukarno menjadi suatu diktator semata (Noer, 1990: 496-514)

Perbedaan memanglah wajar dikala masing-masing mempunyai gagasan, maka dalam rangka untuh memulihkan keadaan yang ada Hatta yang semula menjadi Wakil Presiden yang merangkap sebagai Perdana Menteri kembali diusahakan terus termasuk orang-orang yang bersimpati

guna menyelesaikan persoalan negeri. Hingga dalam bulan November 1957 saat Munap berlangsung, dibentuklah suatu panitia yang berjumlah 9 orang untuk mengembalikan bentuk kerja sama antara dua tokoh proklamator tersebut. Akan tetapi sesuai dengan pendirian Hatta ketika berhenti sebagai Wakil Presiden, ia merasakan bahwa kedudukan yang diembangkannya merupakan sebuah tanggung jawab moral yang besar, oleh karenanya menolaknya dan memilih menjadi warga biasa. Meski Hatta menjadi warga biasa, namun kontribusinya sangatlah besar dalam menyumbangkan segenap tenaga dan pikiran untuk perkembangan Indonesia. Terbukti berbagai kritikan dan masukan untuk pemerintah Indonesia walau terkadang hal tersebut tidak dihiraukan oleh pemerintah sendiri, bahkan beberapa buku yang ia tulis demokrasi kita dilarang terbit lantaran banyak mengandung kritik tentang konsepsi Demokrasi Terpimpin Sukarno (Noer, 1990: 527).

I. Hatta dan Orde Baru

Konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin yang digawangi oleh Sukarno ternyata banyak lika-likunya sampai tiba saat terjadi tragedi yang sangat mengerikan dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa yang bersejarah tersebut terkenal dengan sebutan G30S/PKI yang baru dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965 bermula di daerah ibu kota Jakarta, yang selanjutnya membawa dampak yang cukup dahsyat bagi perubahan di Indonesia. Dengan terbunuhnya enam perwira tertinggi dan seorang kapten

Angkatan Darat. Akhirnya Sukarno secara terpaksa harus memberikan mandat kepada Letnan Jendral Suharto untuk mengatasi keadaan.

Akhirnya dalam sidang istimewa MPRS tanggal 7-12 Maret 1967 yang menyebutkan pemberhentian Sukarno sebagai Presiden dan mengangkat Suharto sebagai Presiden baru. Hatta sendiri sangat menyayangkan dengan tragedi yang menewaskan 6 perwita tersebut. Hatta juga mengingatkan akan bahaya bila percobaan ini benar-benar dilakukan, namun dengan jelas bahwa hal itu bagi Hatta menunjukkan kebenaran dari tesisnya bahwa konsepsi yang dibangun oleh Sukarno hanya bertahan selama ia masih kuat. Menurutnya ini bermula ketika landasan Nasakom yang membuat PKI bisa masuk kemana-mana sampai ke dalam daerah. Situasi yang seperti ini telah dimanfaatkan betul oleh PKI, agaknya Sukarno memang bermaksud untuk menciptakan keadaan yang mana PKI tidak berada dalam posisi oposisi yang dapat membahayakan, melainkan dengan pihak yang bertanggungjawab dengan pihak nasionalis dan agama secara harmonis. (Noer, 1990: 651-770).

Memanglah telah banyak yang sudah dikemukakan tentang nasib perkembangan moral dan materil yang semakin memburuk yang selama ini dirasakan oleh masyarakat yang kian menjadi-jadi. Oleh karenanya diperlukan suatu jalan keluar menuju keselamatan dengan perubahan. Seorang penandatanganan lain yang semula tidak dikenal sebelumnya yang disebut Sawito Kartowibowo yang kemudian dikenal dengan “Peristiwa Sawito”. Topik mengenai adanya desas-desus pergantian Presiden memang

menjadi hal yang hangat di Jakarta. Beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan menuju keselamatan pada tanggal 17 Juli - 11 Agustus 1976 yang sudah ditandatangani dan diperkuat lagi oleh Hatta dengan penandatanganan tanggal 7 September 1976 yang merupakan dasar dari pengamalan nilai-nilai Pancasila demi kemaslahatan bangsa Indonesia.

Di dalam isi dokumen tersebut terdapat nasihat untuk Presiden yang menyatakan bahwa “Mundur untuk maju lebih sempurna” yang sudah ditandatangani Hatta sebelumnya ternyata ia sendiri tidak memperhatikan isi dari surat tersebut. Surat atau naskah tersebut ternyata dibuat oleh Sawito dengan demikian Hatta yang secara tak sadar tergerakkan semata-mata karena untuk menegakkan Pancasila dan tidak melihat isi dari surat tersebut. Baru setelah rancangan yang dibuat oleh Sawito diketahui oleh Hatta yang diungkap oleh pemerintah, kemudian dengan menyesal dan memohon pengertian dari presiden. Hal ini tak bisa disalahkan karena mengingat usia Hatta yang tak lagi muda dulu.

Hatta secara manusiawi memanglah sebagai manusia yang bermoral tinggi, meskipun secara politik ia tetap tegas terhadap kawan lamanya, seketika Hatta mendengar kabar dari kawan seperjuangannya pada masa lalu yang tak lain adalah Sukarno yang terus memperlihatkan kondisinya yang terus kian bertambah parah, segera ia mengirimkan surat kepada Presiden Suharto dengan harapan mendapatkan izin untuk mendapatkan perawatan.

Dalam surat yang sama Hatta menyesalkan terhadap Suharto yang demikian belum juga menyerahkan Sukarno ke pengadilan. Keterlibatan Sukarno dalam peristiwa G30S/PKI sampai kini memanglah tidak ada bukti yang terkait. Ditambah lagi dengan tidak adanya sidang yang menyusutnya di pengadilan. Hatta lebih melihat bahwa Sukarno yang waktu itu sebagai eksekutif yang mana mau tak mau harus mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut. Sungguhpun betapa keras watak Hatta secara politis, sebagai manusia ia tetap memandang lunak terhadap Sukarno. Secara singkat demikianlah sosok Hatta yang berjuang tidak habis-habisnya dengan sosok yang bermoral dan anggun dalam menyikapi setiap perkembangan yang ada (Noer, 1990 : 691-705).

J. Peranan dan Karya Hatta

Mohammad Hatta sangat berperan dalam memberikan kontribusinya yang luar biasa pada bangsa, ditambah lagi Hatta ialah orang yang sangat produktif, aktif dan memiliki kecerdasan spiritual serta intelektual yang memadai terbukti karya dan peranannya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Peran dan Karya Hatta

Peran	Karangan Hatta (Artikel Makalah)
1. Salah satu <i>founding fathers</i>	1. Indonesia Merdeka (Indonesia Vrijs) tahun 1928.
2. Bersama Ir. Soekarno	2. Demokrasi Kita, Jakarta : Panji Masyarakat, 1960.

<p>menandatangani naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia</p> <p>3. Menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.</p> <p>4. Hatta adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan nama “Indonesia” dalam tulisan yang diterbitkan oleh <i>De Socialist</i> pada Desember 1928</p> <p>5. Membuktikan diri dengan perlawanannya atas terjadinya penghinaan dan</p>	<p>3. Uraian Pancasila, Jakarta : Yayasan Idayu, 1975.</p> <p>4. Pengertian Pancasila, Jakarta : Idayu Press, 1977.</p> <p>5. Permulaan Pergerakan Nasional, Jakarta : Idayu Press, 1977.</p> <p>6. Bung Hatta Menjawab, Jakarta : Gunung Agung, Peny. Zainul Yasni, 1978.</p> <p>7. Memori, Jakarta : Tintamas, 1979.</p> <p>8. Ekonomi Indonesia, dalam ISLD, 15 Juni 1979. Ilmu dan Agama, Jakarta : Yayasan Idayu, 1980.</p> <p>9. Nama Indonesia (Penemuan Komunis), Jakarta : Yayasan Idayu, terj. Bagus Siagian, 1980.</p> <p>10. Alam Pikiran Yunani 1941-1950, Jakarta : Tintamas, 3 Jilid, 1982.</p> <p>11. Rasionalisasi, Surabaya, 1939.</p>
---	--

<p>penindasan kepada rakyat atas jajahan Hindia Belanda di depan pengadilan di Belanda.</p> <p>6. Mampu menyelesaikan konflik ideologi Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat pencantuman asas ketuhanan</p> <p>7. Manifesto 1 November 1945 merupakan penegasan kemajuan dalam mewujudkan “kebebasan ke dalam bagi warga negara, sama pentingnya dengan</p>	<p>12. Mencari Volkend Bond dari Abad ke Abad, Bukittinggi : Penyiaran Ilmu, 1939.</p> <p>13. Bank dalam Masyarakat Indonesia, Bukittinggi : Bank Nasional, 1942.</p> <p>14. Beberapa Pasal Ekonomi, Jakarta : Balai Pustaka, 2 Jilid, Jilid I, Cet. Ke-4, tahun 1950 dan Jilid II, Cet. Ke-2, 1951.</p> <p>15. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta : Kementerian Penerangan, 1950.</p> <p>16. Kooperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi, Jakarta : Kementrian Penerangan, 1953.</p> <p>17. Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta : Tintamas, 1953.</p> <p>18. Meninjau Masalah Kooperasi, Jakarta : Pembangunan, 1954.</p> <p>19. Verspreide Geschriften, Jakarta : Van deer Peet, 1952.</p>
--	---

<p>kehendak bebas dari kekuasaan luar”.</p> <p>8. Mewakili delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag. Untuk pertama kalinya bangsa Indonesia menerima sepenuhnya Deklarasi Universal HAM.</p> <p>9. Drs. Mohammad Hatta dipercaya mendampingi Ir. Soekarno menjadi wakil pertama Republik Indonesia.</p>	<p>20. Pengantar ke Jalan Ekonomi Perusahaan, Jakarta : Pembangunan, 1955.</p> <p>21. Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan, Jakarta : Pembangunan, 1954.</p> <p>22. Indonesia’s Foreign Policy, in Foreign Affairs, No. 3, April, 1953.</p> <p>23. Kooperasi dan Pembangunan, Jakarta : Kementerian Penerangan, 1956.</p> <p>24. The Cooperativ Movement In Indonesie, Ithaca, New York : Cornel University Press, 1956.</p> <p>25. Lampau dan Datang, Jakarta : Djembatan, 1956.</p> <p>26. Meninjau Sumatera Tengah, dalam Pikiran Rakyat, 3 Juni 1957 dan 24 Juni 1957.</p> <p>27. Meninjau Tugas Kita, 8 Juli 1957.</p>
--	--

Sumber: Noer, D. (1990). *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.